

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu indikator makro keberhasilan pembangunan ekonomi diantaranya dilihat dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang diantaranya diukur dengan besarnya Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto untuk daerah, baik tingkat I maupun tingkat II.

Berdasarkan pertimbangan bahwa daerah lebih mengerti dan mengetahui kebutuhan masyarakat di daerahnya, maka lahirlah konsep otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Otonomi daerah memberikan tantangan, kendala dan peluang kepada daerah untuk mengelola pembangunan di daerahnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah. Salah satunya adalah tingkat kemandirian dan kesiapan sumber-sumber pembiayaan daerah. Dalam hal kemandirian pembiayaan daerah, maka pemerintah daerah dituntut untuk mampu menggali potensi-potensi baru dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam rangka mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang kondusif, salah satu komponen yang diandalkan oleh Pemerintah adalah Belanja Modal. Keberadaan Alokasi Belanja Modal bersumber dari bantuan pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana tersebut mempunyai peranan strategis, karena penggunaannya untuk membiayai pembangunan di bidang sarana dan prasarana yang dapat menunjang pembangunan ekonomi.

Dalam hal membangun perekonomian melalui otonomi daerah, maka pemerintah memerlukan berbagai kebijakan otonomi daerah yang mendukung. Menurut Darwanto dan Yustikasari (dalam Risuhendi, 2012) menyatakan bahwa kebijakan otonomi daerah merupakan pendelegasian kewenangan yang disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam kerangka desentralisasi fiskal. Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, menunjukkan bahwa potensi fiskal pemerintah daerah antara satu dengan daerah yang lain bisa menjadi sangat beragam. Perbedaan ini pada gilirannya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang beragam pula. Dengan demikian, bahwa desentralisasi memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dengan mengalokasikan secara efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan layanan publik.

Secara umum rata-rata pertumbuhan PDB Indonesia sebelum desentralisasi fiskal (1995 -1999) tumbuh sebesar 1,68 persen dengan rata-rata PDB sebesar 1.387.311,36 miliar rupiah. Sedangkan pada periode desentralisasi fiskal (2000-2004) rata-rata pertumbuhan PDB naik menjadi 4,55 persen dengan rata-rata PDB sebesar 1.514.652,47 miliar rupiah. Apabila kita bandingkan dengan sebelum desentralisasi fiskal rata-rata pertumbuhan PDB mengalami kenaikan. Tetapi jika dilihat dari rata-rata PDRB Kabupaten/Kota di Indonesia justru terjadi penurunan yang sangat kecil yaitu sebesar 3660,45 miliar rupiah pada periode tahun 1995-1999 dan menjadi 3649,76 miliar rupiah pada periode tahun 2000-2004 dari Penurunan PDRB ini disebabkan oleh pemekaran sejumlah kabupaten dan kota baru. Karena sebelum era desentralisasi fiskal jumlah Kabupaten dan Kotamadya adalah 379 dan pada era desentralisasi fiskal

menjadi 415. Dengan demikian terjadi pemekaran sebanyak 36 Kabupaten dan Kota baru.

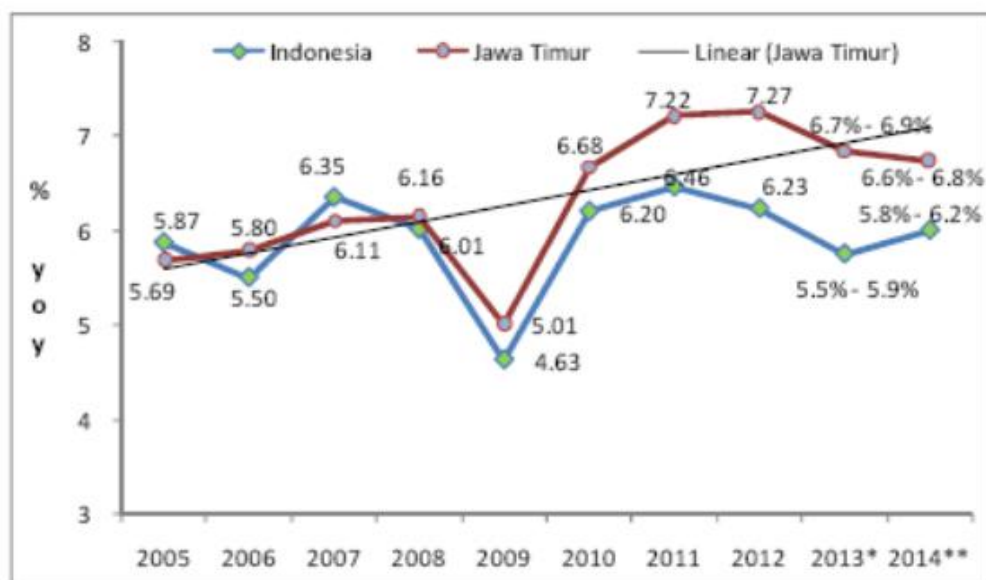
Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto dan Peranan PDRB Provinsi terhadap 33 Provinsi Atas Dasar Harga berlaku, 2012

Provinsi	Produk Domestik Regional Bruto (Triliun Rp)		Peranan PDRB (Persen)	
	Migas	Tanpa Migas	Migas	Tanpa Migas
Aceh	96,2	81,0	1,4	1,3
Sumatera Utara	351,1	348,8	5,2	5,6
Sumatera Barat	110,1	110,1	1,6	1,8
Riau	469,1	296,4	7,0	4,8
Kepulauan Riau	91,7	85,9	1,4	1,4
Jambi	72,7	61,8	1,1	1,0
Sumatera Selatan	206,3	157,3	3,1	2,5
Kepulauan Bangka Belitung	34,3	33,7	0,5	0,5
Bengkulu	24,2	24,2	0,4	0,4
Lampung	144,6	143,0	2,1	2,1
DKI Jakarta	1.103,7	1.098,6	16,4	17,7
Jawa Barat	946,9	908,4	14,1	14,7
Banten	212,9	212,9	3,2	3,4
Jawa Tengah	556,5	497,8	8,3	8,0
DI Yogyakarta	57,0	57,0	0,8	0,9
Jawa Timur	1.001,7	997,9	14,9	16,1
Bali	83,9	83,9	1,2	1,4
Nusa Tenggara Barat	49,5	49,5	0,7	0,8
Nusa Tenggara Timur	35,3	35,3	0,5	0,6
Kalimantan Barat	75,0	75,0	1,1	1,2
Kalimantan Tengah	55,9	55,9	0,8	0,9
Kalimantan Selatan	75,9	75,2	1,1	1,2
Kalimantan Timur	419,1	272,7	6,2	4,4
Sulawesi Utara	47,2	47,1	0,7	0,8
Gorontalo	10,4	10,4	0,2	0,2
Sulawesi Tengah	51,1	50,0	0,8	0,8
Sulawesi Selatan	159,4	159,2	2,4	2,6
Sulawesi Barat	14,4	14,4	0,2	0,2
Sulawesi Tenggara	36,6	36,6	0,5	0,6
Maluku	11,5	11,4	0,2	0,2
Maluku Utara	6,9	6,9	0,1	0,1
Papua	77,8	77,8	1,2	1,3
Papua Barat	42,8	18,8	0,6	0,3

Sumber: BPS, *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia*, Agustus 2013.

Jika melihat gambaran desentralisasi fiskal di Indonesia ditunjukkan dengan perbedaan jumlah PDRB selaku penyusun PDB nasional. Jawa Timur merupakan penyusun PDB nasional terbesar nomor dua dengan presentase 14,9 persen (PDB migas) dan 16,1 persen (PDB non migas). Pola pertumbuhan ekonomi yang sama antara perekonomian nasional dan perekonomian Jawa Timur menunjukkan kemiripan struktur perekonomian, seperti yang terlihat pada grafik 1. Terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2009 dari 6,16 persen menurun menjadi 5,01 persen (Jawa Timur) dan 6,01 persen menurun menjadi 4,63 persen (Nasional). Walaupun terjadi peningkatan pada tahun 2010 hingga 2012, namun pertumbuhan ekonomi yang terjadi setelahnya cenderung mengalami penurunan secara perlahan.

Grafik 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dan Nasional



Sumber: Badan Pusat Statistik,(2013)

Berdasarkan pemaparan masalah-masalah diatas, mendorong penulis untuk melihat bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal dan alokasi belanja

modal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa timur.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Jawa Timur secara parsial?
2. Bagaimana pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Jawa Timur secara simultan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur secara parsial terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur secara simultan terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

- a) Manfaat Empiris, untuk memperkuat penelitian sebelumnya , berkenaan dengan pengaruh besarnya belanja modal Pemerintah terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dilakukan secara empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
- b) Manfaat Kebijakan, memberikan masukan baik bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang akan datang yang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dari APBN, APBD, UU, PP serta PERDA yang menyertainya.
- c) Manfaat Teoritis, sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis yang saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya. Secara ringkas sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat hal-hal yang secara garis besar mengantarkan pada pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai teori-teori yang melandasi penelitian sesuai dengan permasalahan yang ada, dimana landasan teori ini diperoleh selama

masa perkuliahan maupun literatur-literatur yang dapat dijadikan sebagai dasar pedoman penelitian. Bagian selanjutnya mengenai tinjauan pustaka terhadap penelitian sebelumnya yang menjelaskan letak persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan yang dilakukan penulis. Bagian akhir dari bab dua ini adalah model analisis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai pendekatan penelitian, metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer yang diperoleh dengan observasi secara langsung ketempat penelitian dan wawancara kepada para responden dan analisis data sekunder diantaranya diperoleh melalui BPS Propinsi Jawa Timur.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai permasalahan yang diangkat dalam penellitian. Berupa pembahasan trhadap permasalahan dengan berdasarkan pada data yang ada serta menganalisisnya dengan bantuan teknik analisis yang sudah dipersiapkan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi ini dimana dalam bab ini terdiri dari kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan serta saran-saran yang dianggap perlu berkenan dengan hasil pembahasan skripsi.